

# Identitas Etnik dalam Komunikasi Politik

Ilyas Lampe

Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Tadulako Palu, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Tadulako Jl. Soekarno Hatta Km.9 Kampus Bumi Kaktus, Kelurahan Tondo, Palu  
Kode Pos 94118 HP: 081342654249 / e-mail: [balaula\\_lias@yahoo.com](mailto:balaula_lias@yahoo.com)

## **Abstract**

*In the political context, especially in House of representative (DPRD), ethnic group's identification becomes fundamental in terms of attitudes and political communication. Ethnic group's identity becomes a major problem when dealing with political communication especially in democratic system. It's functions as distinguishing feature or co-identification to other parties that use to achieve political supports. This research used qualitative method using dramaturgies approach and situational ethnicity. Data collection is done through in depth interview, observation, and documentation study. The result of the research showed that artificial attributes of political communication such as dressing, life-style and vehicles is considered as impression management in the political arena. Whereas the symbols of ethnic group identity that is found in political communication, are clan as identity, local language, accent and customs. Those various symbols again raise stigmatization "new-comers" and "local people" as form of distinguishing feature and co-identification of ethnic group's identity in the political communication. The term new-comer is given to those who have no genealogical bound, marriage, place of birth or relationship with elites from Kaili ethnicity. In the process, the new-comers try to construct new identity called "Orang Palu" that is considered to be neutral and is capable of protecting all ethnicities that live and have connection with Palu.*

## **Abstrak**

Identifikasi identitas etnik yang lazim dilakukan pada masyarakat multietnik senantiasa diarahkan pada situasi dan konteks di mana seseorang berada. Dalam konteks politik, terutama pada lembaga seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), identifikasi identitas etnik menjadi hal penting dalam aktifitas politik. Identitas etnik adalah sesuatu yang problematik ketika dihadapkan dengan komunikasi politik, terutama dalam sistem pemilu yang demokratis. Hal tersebut bisa menjadi pembeda atau ko-identifikasi bagi pihak-pihak yang menggunakannya untuk tujuan meraih dukungan politik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan dramaturgi dan etnik situasional. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara mendalam, pengamatan dan studi dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa atribut artifisial komunikasi politik anggota DPRD Palu seperti pakaian yang digunakan, gaya hidup, kendaraan yang dimiliki dan gaya berkomunikasi merupakan bentuk pengelolaan kesan (*impression management*) dalam panggung politik. Sementara simbol-simbol identitas etnik yang ditemukan dalam komunikasi politik adalah, klan sebagai identitas, bahasa daerah, logat dan adat istiadat. Beragam simbol tersebut kemudian melahirkan stigma pendatang dan asli sebagai bentuk pembeda dan ko-identifikasi identitas etnik. Istilah pendatang disematkan pada orang yang tidak memiliki ikatan genealogis, perkawinan, tempat lahir dan hubungan erat dengan tokoh beretnis Kaili. Etnik pendatang lalu mengkonstruksi identitas baru yang mereka sebut sebagai "orang Palu". Penggunaan beragam identitas tersebut juga dilakukan sesuai konteks dan waktu yang dianggap dapat memberikan keuntungan politik, penerimaan sosial dan budaya.

**Kata Kunci** : identitas etnik, pengelolaan kesan dan etnik situasional

## Pendahuluan

Identitas etnik, agama dan politik hampir-hampir sulit dipisahkan. Hal ini berarti bahwa keberagaman seseorang lebih banyak dipengaruhi keturunan dan lingkungan, bukan pilihan bebas. Tempat lahir, warna kulit, bahasa, dan agama merupakan realitas primordial yang diterima seseorang, bukan karena hasil usahanya sendiri. Begitu pun pilihan politik, hubungan kekerabatan, dan faham keagamaan sangat signifikan pengaruhnya. Misalnya saja, meski tidak selalu taat menjalankan ajaran agama, para imigran Turki di Eropa jika ditanya agamanya pasti menjawab Islam. *"I am Turk, therefore I am a Moslem"*. Warga Melayu di Malaysia, kalau tidak beragama Islam akan dianggap khianat terhadap identitas etniknya (Hidayat, 2007).

Identifikasi identitas etnik sebagaimana lazim dilakukan pada masyarakat yang multietnik senantiasa diarahkan pada situasi dan konteks di mana seseorang berada. Dalam konteks politik di wilayah yang multietnik terutama pada lembaga DPRD, identifikasi identitas etnik menjadi kepastian. Tujuannya adalah secara personal akan mengangkat citra diri dan popularitas politisi yang bersangkutan dan secara kelompok akan memupuk penerimaan khalayak terhadap partai tempat di mana politisi tersebut bergabung.

Etnisitas sebagai salah satu kategori dalam sosiologi politik berkembang seiring dengan perubahan pola politik identitas. Dalam tatanan rezim politik yang bersifat tertutup, etnisitas secara sengaja dicoba untuk dieliminasi dari panggung arena politik. Kendati demikian, etnisitas dalam kadar tertentu terus bermain dalam politik identitas dalam panggung kekuasaan secara laten. Sementara itu, dalam tatanan rezim politik yang bersifat terbuka, etnisitas justru nampak terus mengalami penguatan, mendapatkan ruang ekspresi yang semakin luas. Bahkan etnisitas seringkali menjadi dasar legitimasi sejarah sosial politik maupun struktur politik pada level lokal atau daerah.

Kota Palu sebagai wilayah yang heterogenitas penduduknya cukup tinggi menyisakan berbagai persoalan dalam berbagai dimensi relasi sosial, ekonomi dan politik. Heterogenitas itu dapat dilihat pada data hasil sensus tahun 2000 yang

mencantumkan etnik dalam pertanyaan survey, menunjukkan bahwa prosentase penduduk berdasarkan etnik, sebagai berikut: Kaili (asli) 38,71 persen, Bugis 22,47 persen, Jawa 9,38 persen, Gorontalo 2,86persen, Buol 1,21 persen dan Bali 1,08 persen, Banggai 0,72 persen, Saluan 0,71 persen selebihnya 22,86 persen adalah etnik lainnya (Suryadinata, 2003). Kaili atau Suku Kaili adalah etnik mayoritas yang mendiami Sulawesi Tengah. Suku Kaili mendiami secara mayoritas pada empat Kabupaten dan Kota yaitu; Kabupaten Sigi, kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi dan Kota Palu. Sebagian kecil berada di Kabupaten Tojo Una-una dan Kabupaten Poso. Etnik Kaili berdasarkan penelitian Mattulada (1989) membagi etnik Kaili ke dalam sub-sub etnik; To Palu, To Dolo, To Sigi, To Sidondo, To Tavaili, To Balinggi, To Banggokoro, To Sausu, To Dolago, To Palimbe, To Kulawi, To Tamungkulowi, To Baku, To Raranggunau dan To Riparigi. Sub etnik tersebut juga memiliki sub dialek bahasa masing-masing, diantaranya dialek Ledo, Tara, Rai, Ija, Tajio, Kori, Unde, Da'a, Doi, Uma, Ava dan lain sebagainya. Tetapi sub etnik yang banyak mendiami Kota Palu adalah sub etnik yang berbahasa Ledo, Rai, Unde dan Da'a.

Identifikasi diri sebagai bagian dari etnik lokal atau sebaliknya sebagai etnik pendatang sangat penting dalam konteks politik lokal saat ini. Simbol-simbol etnik menjadi salah satu bagian penting dalam proses interaksi antara masyarakat yang berbeda etnik. Simbol-simbol dan atribut etnik menjadi pembeda bagi siapa saja dalam interaksi sosial, termasuk dalam hal bagaimana seseorang menjalani peran-peran politik. Ini berarti bahwa seorang politisi juga menghadapi situasi yang sama dalam interaksi mereka dalam masyarakat. Aktifitas komunikasi politik sebagai kunci keberhasilan seseorang dalam meraih sukses dalam peran politik tentu saja harus menggunakan identitas etnik tersebut untuk memperluas penerimaan masyarakat. Di dalamnya termasuk, bagaimana seseorang politisi (anggota DPRD) mempertukarkan simbol dengan rekan-rekan mereka untuk mencapai tujuan politik masing-masing.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) adalah lembaga yang memiliki otoritas dalam menetapkan kebijakan untuk kepentingan rakyat, yang dalam

aktifitasnya diwarnai beragam pesan-pesan komunikasi politik untuk mencapai keputusan. Dalam aktifitas komunikasi politik tersebut, komunikator politik akan menggunakan beragam simbol dan atribut etnik. Anggota DPRD sebagai komunikator politik memungkinkan untuk memanipulasi, mengkonstruksi dan menggunakan identitas etnik tersebut sesuai dengan konteks dan waktu untuk kepentingan politik yang dikehendakinya.

Penelitian ini merupakan kajian identitas etnik dalam konteks komunikasi politik. Kajian ini berusaha mengungkap mekanisme atau proses komunikasi politik anggota DPRD Kota Palu dalam peran politiknya. Apakah dengan simbol-simbol, atribut, *setting* dan peran-peran tertentu yang dipilih atau dibentuk dan dipergunakan ketika mengidentifikasi ciri identitas diri dan etnik-nya. Hal mana tentu saja identitas tersebut dapat bersifat politis, mana yang ditonjolkan, disembunyikan atau dimanipulasi untuk tujuan yang diharapkan komunikator politik bersangkutan.

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menemukan berbagai konsep baru yang berhubungan dengan mekanisme konstruksi kategori etnik anggota DPRD, sebagai identitas yang bersifat khusus dalam perilaku komunikasi politik. Sementara tujuan khususnya adalah untuk mengetahui atribut dan simbol-simbol identitas etnik yang dipergunakan dalam komunikasi politik anggota DPRD Kota Palu, serta menemukan dan mengkonstruksi konsep-konsep baru tentang mekanisme perubahan dan kesinambungan identitas etnik dalam proses komunikasi politiknya.

Jika kajian politisi sebagai komunikator politik diidentikkan dengan kelompok sosial yang tidak abadi, sebagaimana peran politisi sebagai anggota DPRD yang dibatasi oleh pemilu, maka pendekatan Teori Dramaturgi Erving Goffman menjadi menarik. Pendekatan Goffman pada situasi yang tidak berlangsung lama dan intensif menuntut seseorang untuk menyajikan dan menggambarkan dirinya ke dalam situasi yang non kelembagaan sehingga menjadi pisau analisis yang juga cocok untuk membedah dinamika komunikasi politik anggota DPRD. Hal ini sejalan dengan konsep *encounters* yang disampaikan Goffman (Lely Ariannie, 2006) tentang pengelolaan kesan

dalam kelompok-kelompok yang tidak berusia panjang. Seperti panggung politik yang perannya dibatasi waktu pemilu ke pemilu. Begitu juga peran komisi atau fraksi maupun pansus tidak pernah lebih panjang dari usia pemilu itu sendiri. Bahkan kesetiaan politisi kepada politisi yang lain dari partai yang sama sekalipun tidak pernah abadi bergantung bagaimana kepentingan mereka terakomodasi.

Goffman mengasumsikan bahwa ketika orang-orang berinteraksi, mereka akan menyajikan suatu gambaran diri yang akan diterima orang lain. Ia menyebut upaya itu sebagai “pengolahan kesan” (*impression management*) yakni teknik-teknik yang digunakan aktor untuk memupuk kesan-kesan tertentu dalam situasi tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Kebanyakan atribut, milik atau aktifitas manusia digunakan untuk presentasi diri, termasuk busana yang dipakai, rumah yang kita huni dan perabotannya, cara kita berjalan dan berbicara, pekerjaan yang dilakukan dan cara orang menghabiskan waktu luang. Memang segala sesuatu yang terbuka mengenai diri seseorang dapat digunakan untuk memberitahu orang lain siapa dirinya.

Dramaturgi juga menyimpulkan bahwa kehidupan sosial dapat dilihat dari dua sisi yakni wilayah depan (*front region*) sebagai area social dan wilayah belakang (*back region*) sebagai area pribadi. Dengan kata lain diri seutuhnya milik aktor tetapi lebih sebagai hasil interaksi dramatis antara aktor dengan audiens. Berdasarkan pandangan dramaturgis, seseorang cenderung mengengahankan sosok diri yang ideal sesuai dengan status dan perannya dalam kegiatan rutin. Artinya orang akan menyembunyikan fakta dan motif yang tidak sesuai dengan citra dirinya.

Guna menjelaskan konsep diri dalam hubungannya dengan identitas keetnikan yang dimaksud dalam penelitian ini, maka digunakan konsep-konsep identitas etnik perspektif Frederik Barth. Barth mengembangkan teorinya dalam konteks identitas etnik, yang disebutnya keetnik-an situasional (*situational ethnicity*). Pada batas ini para aktor berupaya mengeksploitasi simbol-simbol budaya dan menampilkan perilaku etnik tertentu yang berubah-ubah dari waktu-kewaktu, sesuai situasi tertentu, atau sesuai dengan kepentingan pribadi atau sosial (Mulyana, 2006:93).

Hal ini dianggap penting sebab sangat terkait dengan citra diri (*self image*) dan harga diri (*self esteem*) baik sebagai individu maupun kelompok. Identitas-identitas inilah yang akan selalu dialami, dikomunikasikan, diolah ataupun dikonstruksi setiap individu dalam berinteraksi.

Perspektif Barth mengilhami banyak ahli untuk meneliti apa yang disebut sebagai etnisitas situasional, yaitu bagaimana identitas etnik digunakan individu-individu dalam interaksi dengan orang lain. Individu menganggap identitas etnik sebagai dinamik, cair, situasional sebagaimana ditunjukkan Armstrong (1986), dan Mulyana (1994). Individu menunjukkan bagaimana identitas etnik dan lambang-lambanganya dimanipulasi untuk kepentingan-kepentingan pribadi, sosial, ekonomi, dan politis tertentu.

Adanya perbedaan etnis dalam interaksi sosial tidak seharusnya melepaskan identitas etnik seseorang walaupun antara kedua etnik yang hidup berdampingan diantara masyarakat yang berbeda budaya. Keharmonisan dan hubungan antaretnik merupakan kemutlakan guna menjalani kehidupan yang lancar. Di pihak lain tidak ada satu budaya pun yang tidak dipengaruhi oleh budaya lain. Demikian halnya budaya yang dominan atau budaya pribumi yang biasa mempengaruhi budaya yang minoritas atau budaya pendatang. Selanjutnya budaya minoritas terpengaruh oleh budaya yang dominan akibat dari tekanan-tekanan lingkungan budaya itu sendiri (Barth, 1988).

### **Metode Penelitian**

Subjek atau informan penelitian ini adalah anggota DPRD Kota Palu masa bakti 2009-2014. Berdasarkan keterwakilan etnis maka informan yang dipilih adalah enam orang. Sementara itu objek penelitiannya adalah bagian dari perilaku komunikasi politik anggota DPRD Kota Palu yang disebut dengan tindakan yang dikomunikasikan baik berupa atribut etnik, simbol-simbol komunikasi (verbal dan nonverbal), bahasa, *setting* komunikasi dalam mengungkapkan identitasnya dalam konteks relasi sosial dan politik.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan dramaturgi Erving Goffman dan etnik situasional Fredrik Barth. Penelitian kualitatif atau *interpre-*

*tive paradigm* yang digunakan dalam penelitian ini tidak lepas dari dukungan teori meskipun peneliti kualitatif beranggapan bahwa mereka justru harus membebaskan dirinya dari “tawanan suatu teori”. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dan penelusuran pustaka yang relevan. Analisis dilaksanakan sepanjang penelitian berlangsung, data dikategorikan dan diklasifikasikan sesuai dengan tema dan model. Untuk menjaga keabsahan data yang diperoleh, peneliti melakukan konfirmasi dengan mendatangi kembali informan setelah hasil wawancara sebelumnya diklasifikasi berdasarkan fokus penelitian.

### **Hasil Penelitian Dan Pembahasan Atribut dan Simbol-simbol Identitas pada Panggung Politik Atribut Artifisial pada Panggung Politik**

Banyaknya partai yang berkontestasi pada pemilu tahun 2009, menyebabkan keanggotaan DPRD di Kota Palu pun menjadi sangat beragam. Berdasarkan data hasil pemilu tahun 2009 terdapat 13 partai politik yang berhasil menempatkan wakilnya di DPRD Kota Palu. Partai Politik tersebut adalah: (1) Partai Golongan Karya (Golkar); (2) Partai Demokrat; (3) Partai Keadilan Sejahtera (PKS); (4) Partai Persatuan Pembangunan (PPP); (5) Partai Amanat Nasional (PAN); (6) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP); (7) Hati Nurani Rakyat (HANURA); (8) PKPB; (9) Partai Peduli Rakyat Indonesia (PPRN); (10) Barisan Nasional (Barnas); (11) Partai Bulan Bintang (PBB); (12) Partai Bintang Reformasi (PBR); (13) Partai Damai Sejahtera (PDS).

Keadaan tersebut ditambah lagi dengan kenyataan bahwa Kota Palu didiami oleh beragam etnik sehingga keanggotaan DPRD pun sangat beragam. Di lihat dari ragam etnik, penduduk Sulawesi Tengah terdiri dari 16 etnik pemukim pertama (asli) dan 14 etnik sebagai penduduk pemukim susulan (pendatang), dengan ragam bahasa 14 bahasa penduduk asli dengan 70 ragam dialek, yang tersebar pada 10 kabupaten dan satu kota. Sebagai ibukota propinsi, representasi etnik tersebut juga hadir di Kota Palu, tentu dengan presentasi yang berbeda.

Akibat dari keadaan tersebut proses politik yang berlangsung banyak diwarnai lobi-lobi di luar jalur politik yang pakem mengingat tidak adanya partai politik yang memiliki kursi yang bisa mencapai mayoritas untuk mengambil keputusan bulat dalam setiap sidang dan pemungutan suara. Karenanya kemampuan komunikasi politik dengan bermacam pendekatannya menjadi hal penting dalam mengagregasi kepentingan partai atau kelompok terutama dalam menetapkan suatu keputusan baik penetapan Perda, APBD dan Pencalonan Walikota atau Wakil Walikota serta keputusan penting lainnya. Di DPRD Palu, meski anggota yang berasal dari Partai Golkar masih yang terbesar yaitu tujuh kursi namun jumlah itu jauh dari minimal  $1/2$  jumlah anggota yang berjumlah 30 orang untuk pengambilan keputusan yang bulat lewat satu fraksi. DPRD Kota Palu terbagi ke dalam lima fraksi. Masing-masing, (1) Fraksi Golkar dengan tujuh kursi, (2) Fraksi Demokrat enam kursi (terdiri dari lima kursi dari Partai Demokrat dan satu kursi dari Partai Damai Sejahtera) (3) Fraksi Keadilan Sejahtera tiga kursi, Fraksi Palu Ngataku delapan Kursi (dua PDIP, dua kursi Hanura, masing-masing satu kursi PPRN, PBB, Barnas dan PBR), (4) Fraksi Persatuan Amanat Rakyat enam kursi terdiri dari (dua PPP, dua PAN dan dua PKPB).

Rapat komisi, rapat fraksi, rapat pansus bisa dipandang sebagai suatu arena mempertukarkan pesan-pesan komunikasi politik. Demikian pula pada rapat peripurna, pertukaran simbol-simbol komunikasi sangat beragam. Dalam rapat paripurna seluruh anggota DPRD berkumpul dalam suatu tempat. Mereka berinteraksi saling mempertukarkan simbol komunikasi. Kadang-kadang diwarnai tepuk tangan, saling mendukung argumen, teriakan tidak setuju atau juga interupsi. Wahana itu merupakan panggung pertukaran simbol yang pada umumnya dilakukan di gedung DPRD. Pada proses tersebut, simbol-simbol identitas yang berkaitan dengan etnik juga dapat muncul baik disengaja maupun tidak disengaja. Nada suara, bahasa daerah, logat, aksen, bahkan pakaian yang dikenakan menjadi penanda identitas seorang anggota dewan. Penonjolan identitas-identitas itu akan disesuaikan dengan *setting* komunikasi yang sedang berlangsung, sehingga memberikan efek pengaruh terhadap upaya mem-

bangun citra, baik dalam internal anggota dewan maupun kepada khalayak.

Di sisi lain, para anggota DPRD juga melakukan komunikasi politik dengan konstituentnya. Komunikasi di antara mereka tidak berlangsung dalam situasi formal. Interaksi tersebut berlangsung di halaman ruang fraksi, di mushola, di rumah dan tempat lainnya. Wahana-wahana tersebut di atas merupakan panggung politik di DPRD Kota Palu untuk mempertukarkan pesan-pesan komunikasi politik sebagaimana dikemukakan Goffman dengan dramaturgisnya. Pendekatan Goffman menurut Mulyana (2006), berintikan pandangan bahwa “ketika berinteraksi dengan sesamanya, ia ingin mengelola kesan yang ia harapkan tumbuh pada orang lain terhadapnya. Untuk itu, setiap orang melakukan pertunjukan bagi orang lain. Interaksi yang dilakukan antara anggota DPRD Kota Palu merupakan suatu upaya pengelolaan kesan yang diharapkan tumbuh pada orang lain. Pengelolaan kesan tersebut merupakan bagian dari upaya menyajikan gambaran diri yang dapat diterima orang lain. Tujuan utama dari kegiatan tersebut adalah membangun citra positif dan meningkatkan opini positif publik terhadap anggota DPRD bersangkutan. Hal tersebut sangat penting karena opini publik yang positif adalah kunci dari setiap aktifitas politik seseorang. Dalam konteks komunikasi politik, esensi dari kegiatan komunikasi politik adalah penciptaan opini publik yang positif karena naikturunnya seseorang atau organisasi politik banyak ditentukan oleh opini publik.

Kegiatan komunikasi politik yang berlangsung di DPRD Kota Palu dapat dilihat pada panggung-panggung politik yang pesan politik dipertunjukkan dan ditafsirkan oleh mereka yang terlibat dalam kegiatan komunikasi politik tersebut. Dengan menggunakan pendekatan Dramaturgis Erving Goffman perilaku komunikasi politik dapat dijelaskan dengan mengamati apa yang ditampilkan citra politisi dan konstruksi realitas, semuanya dipertunjukkan dalam suatu wadah/wahana, di mana wadah tersebut sesungguhnya adalah panggung pertunjukan bagi anggota DPRD Kota Palu periode 2009-2014.

Goffman menggambarkan “kehidupan sosial bagaikan teater yang memungkinkan sang aktor memainkan berbagai peran di atas suatu atau

beberapa panggung dan memproyeksikan citra diri tertentu kepada orang hadir sebagaimana yang diinginkan sang aktor dengan harapan bahwa khalayak bersedia menerima citra diri sang aktor dan memperlakukannya sesuai dengan citra dirinya itu". Sering aktor-aktor politik ini melakukan pengelolaan diri tanpa sadar, setengah sadar dan bahkan dengan kesadaran penuh untuk tujuan finansial, politik dan sosial. Pengelolaan kesan yang disengaja mengandung berbagai resiko, alih-alih khalayak menafsirkan perilaku sang aktor secara berbeda. Politisi sebagai aktor sekaligus pemegang mandat partai politik yang mengusungnya dan mandat dari rakyat yang memilihnya (Mulyana, 2006).

Pengelolaan kesan (*impression management*) yang dilakukan untuk mencapai tujuan politik anggota DPRD adalah dengan mengenakan atribut yang bersifat artifisial secara cukup menonjol. *Pertama*, ekspresi identitas melalui pakaian yang dikenakan. Untuk disebut berpenampilan "keren" anggota DPRD pria kebanyakan mengenakan stelan jas yang baru dengan berbagai asesoris yang menyertainya seperti dasi dan kopiah baru. Sementara anggota dewan yang perempuan selalu tampil "cantik" dengan stelan pakaian resmi jika akan mengikuti rapat-rapat. Pada hari-hari yang lain, sebagian anggota dewan perempuan mengenakan pakaian yang paling *trend* saat ini, ditambah dengan berbagai atribut kemapanan seperti perhiasan berupa gelang, kalung dan pin, dan brooch. Dalam soal ini, Kuper (dalam Nordholt, 2005:10) menyatakan bahwa dengan memperhatikan arti penting berpakaian sebagai suatu ekspresi dari identitas sosial, asal usul dan kesetiaan individu maka tidak mengherankan jika orang memandang pakaian hampir seperti perpanjangan diri mereka sendiri. Dapat dimengerti jika kemudian hubungan seseorang dengan pakaiannya bersifat langsung dan lebih akrab daripada hubungannya dengan semua obyek materi yang lain. *Kedua*, kendaraan yang dimiliki. Persoalan kendaraan ini menjadi cukup penting artinya dalam aktivitas anggota dewan dalam komunikasi politik mereka. Meski memiliki kendaraan mewah, prestise anggota dewan tidak terlalu menonjol karena banyaknya kendaraan serupa yang berseliweran di jalan raya. Kendaraan dinas dengan nomor plat khusus (plat merah)

menjadi incaran anggota dewan, karena memiliki nilai prestisius lebih tinggi. Meski demikian kepemilikan kendaraan menjadi simbol kemapanan untuk mempertegas status anggota DPRD yang dianggap berpendapatan tinggi.

Atribut yang bersifat artifisial adalah bentuk dari pengelolaan panggung depan (*front stage*) seorang anggota DPRD. Bagian-bagian dari penampilan di panggung depan merupakan bentuk dari pemeliharaan citra diri supaya stabil di depan khalayak, inilah yang disebut Erving Goffman sebagai "pertunjukan" (*performance*). Sebagaimana disampaikan Herbert Mead (dalam Dilla, 2006) bahwa dalam interaksi manusia menggunakan simbol-simbol, cara menggunakan simbol merepresentasikan apa yang mereka maksudkan untuk berkomunikasi dengan sesamanya.

Goffman juga mengasumsikan bahwa ketika orang-orang berinteraksi, seseorang akan memberikan gambaran diri yang akan dipersepsi orang lain. Ia menyebutnya sebagai "pengolahan kesan" (*impression management*) yakni teknik-teknik yang digunakan aktor untuk memupuk kesan-kesan tertentu, dalam situasi spesifik dan untuk tujuan yang tertentu. Kebanyakan atribut, milik atau aktifitas manusia digunakan untuk merepresentasikan diri, termasuk busana yang dikenakan, rumah dan perabot yang digunakan, kendaraan, cara berjalan dan pekerjaan yang dilakukan untuk mengisi waktu luang. Hal tersebut berarti segala sesuatu yang terbuka mengenai diri kita digunakan untuk memberitahu orang lain siapa diri kita.

Pada panggung depan para pelaku dalam hal ini anggota DPRD berkesempatan untuk menciptakan *image* terhadap pertunjukannya yang sekenarionya sudah diatur dan berbeda jauh dengan panggung belakang. Penampilan individu juga berfungsi secara teratur untuk mendefinisikan situasi bagi mereka yang menyaksikan penampilan itu, yang dikenal juga dengan *setting* dan *personal front* untuk kemudian di bagi lagi menjadi penampilan (*appearance*) dan gaya (*manner*). Berdasarkan pandangan dramaturgis bahwa seseorang cenderung mengetengahkan sosok diri ideal sesuai dengan status peran dan kegiatan rutinnnya (Ariannie, 2006). Seseorang akan menyembunyikan fakta dan motif yang tidak sesuai dengan citra dirinya.

## Nama Keluarga (klan) sebagai Simbol Identitas Politik; Bangkitnya Politik Kekerabatan

Meski nama keluarga atau klan lebih banyak dibicarakan dalam konteks pemilihan kepala daerah (pilkada) dan *rekrutment* birokrat pada tingkat kabupaten, kota dan provinsi, namun nyatanya berdasarkan hasil penelitian menunjukkan nama keluarga (klan) pada kontestasi pemilu DPRD Kota Palu masih menjadi salah satu jaminan keterpilihan dan dalam penentuan jabatan. Jika dalam kontestasi pilkada di tiga Kabupaten dan satu kota di lembah Palu yang didiami secara mayoritas Etnis Kaili kehadiran nama-nama klan seperti Ponulele, Djanggola, Tombolotutu, Lamarau, Lembah, Pettalolo dan Lamakarate maka nama-nama anggota dewan kota Palu juga banyak yang bernama klan tersebut. Bahkan ketua DPRD Kota Palu, berasal dari klan Ponulele. Klan Ponulele misalnya saat ini menguasai beberapa jabatan penting di pemerintahan dan politik di Sulawesi Tengah, diantaranya adalah Aminuddin Ponulele (Ketua DPRD Provinsi Sulteng) yang sementara maju sebagai calon Gubernur Sulteng, Habir Ponulele (Bupati Donggala), Anwar Ponulele (mantan Calon Bupati Sigi), Ali Hanafi Ponulele (anggota DPRD Sigi dan mantan Calon Bupati Sigi), Habsayanti Ponulele (mantan Calon Walikota Palu). Klan dalam konteks ini berbeda dengan dengan istilah fam yang ditemukan pada suku-suku di Maluku dan Batak. Letak perbedaannya pada konteks kemunculan dan penggunaannya. Di Kota Palu dan umumnya etnik Kaili, nama klan ini justru berkembang di era politik terbuka saat ini. Pada saat penulisan artikel ini di Propinsi Sulawesi Tengah sementara berlangsung kampanye pemilihan gubernur. Pelaksanaan pilkada sendiri akan berlangsung tanggal 6 April 2011. Pilkada diikuti lima pasangan calon Gubernur dan wakil gubernur yaitu (1). Prof (Em) H. Aminuddin Ponulele, M.Si – DR. Hj. Lusiana Is Baculu, M.Si; (2). Drs. H. Sahabuddin Mustapa, M.Si – Drs. H. Faisal Mahmud, M.Si; (3). Drs. H. Longki Djanggola, M.Si - H. Sudarto, SH, MH; (4). Ir. Rendy A. Lamadjido, MBA-H. Bandjela Paliudju; (5). H. Ahmad Yahya, SE, MM – Drs. H. Ma'ruf Bantilan, M.Si

Kemunculan beberapa nama keluarga (*family name*) dalam kancah politik lokal Sulawesi Tengah dalam pilkada kabupaten dan kota, menunjukkan bahwa eksistensi keluarga tersebut dibangun dengan menggunakan berbagai instrumen sosialisasi politik. Proses kaderisasi dan penguasaan akses-akses politik telah mendorong mereka sebagai tokoh yang secara sengaja diposisikan dan konstruksi oleh-oleh patron-patron yang berada disekitar tokoh sentral. Klan-klan tersebut terus melanggengkan kekuasaan politik dan pemerintahan karena mereka memiliki modal dan jaringan yang telah berakar dari zaman kerajaan yang kemudian dipertegas dengan kekuasaan yang pernah diduduki sejak jaman orde lama hingga orde baru. Klan-klan tersebut masing-masing mewakili keluarga dengan generasi politik yang pernah memiliki sejarah atau bahkan masih memiliki kekuasaan di daerah Sulteng terutama yang didiami etnik Kaili. Sebagaimana hasil wawancara dengan informan AL (46 thn) seorang anggota DPRD beretnik Kaili dari partai Demokrat berikut ini:

Faktor keturunan itu bisa dikatakan menonjol, bisa juga tidak tapi kalau kita lihat realita sekarang saya bisa bahasakan kalau hal itu menonjol. Karena apa kita melihat si A misalnya, atukah kita melihat fenomena sekarang ini mungkin Habsayanti Ponulele, mungkin sebagian orang saja yang mengenal ibu Habsa. Dan memang ibu Habsa tidak besar di sini tapi melihat Ponulelanya orang sudah tahu ternyata turunan ini, makanya dianggap wajar saja tiba-tiba muncul menjadi calon walikota. Sama saja dengan bapak Mulhanan Tombolotutu, ia kan lebih dikenal dengan nama Tony tapi orang akan sangat mengenalnya ketika menyebut nama Tombolotutu, sebagai orang yang berasal dari Pantai Timur (wawancara tanggal 15 April 2010).

Klan lalu menjadi bagian dari simbol sekaligus pesan dalam komunikasi politik anggota DPRD. Selain dalam jabatan di legislatif mereka, pertimbangan pengisian jabatan eksekutif pun diwarnai dengan kemunculan faktor-faktor genealogis yang ditandai melalui nama belakang seseorang. Seorang informan penelitian menyebutkan bahwa kekuatan klan-klan yang dise-

butkan sebelumnya dalam politik dan birokrasi di Tanah Kaili masih sangat kuat pengaruhnya sehingga sangat sulit untuk menerapkan demokrasi substansial yang didasarkan pada kemampuan seseorang. Pasalnya secara komunikasi politik, mereka yang menjadi bagian dari klan tersebut di atas terus memelihara dan melanggengkan simbol-simbol yang dimilikinya untuk mempertahankan dominasi politik.

Penegasan soal ini dapat dipahami jika kita melihat bahwa ternyata di negara dengan sistem demokrasi sekalipun faktor genealogis memiliki nilai lebih dalam kontestasi kepemimpinan lokal dan nasional. Di Amerika Serikat, kehebatan klan atau keluarga Kennedy diakui hingga saat ini, demikian juga dengan keluarga Bush yang sempat memimpin negara itu dalam dua generasi meski dengan periode yang diselingi oleh rezim lainnya. Keluarga Gandhi di India atau keluarga Abdul Razak dan Datuk Hussain Onn di Malaysia adalah contoh nyata besarnya peran faktor genealogis dalam politik. Dalam konteks Indonesia, keluarga Sukarno adalah contoh klan atau keluarga yang memiliki nilai jual politik yang sangat besar di Indonesia. Ini sejalan dengan apa yang disampaikan Horowitz dan James (2006) bahwa fenomena semacam ini banyak muncul pada negara yang miskin dan masih berkembang di mana struktur politik dijalankan oleh jaringan elit yang berbasis patronase etnis. Horowitz menilai bahwa struktur politik yang dikendalikan oleh patronase etnis lebih cenderung mendistribusikan sumber daya publik kepada kelompoknya masing-masing. Bahkan dalam arena kontestasi pemilihan, struktur politik *clientelism* ini seringkali dijadikan perangkat politik untuk melakukan mobilisasi dan dukungan terhadap kandidat dan partai.

Kemunculan politik kekerabatan tersebut merupakan wujud dari kuatnya politik patronase dengan oligarki yang masih terpelihara pada masyarakat Indonesia. Mereka yang telah memperoleh kekuasaan melalui perjuangan keras pada awal membangun klan politik mewariskan modal ekonomi, modal sosial, modal budaya dan modal simbol kepada keturunan atau keluarganya sehingga memberikan kemudahan pada generasi selanjutnya untuk memperoleh kekuasaan hanya dengan mengelola dengan baik modal yang diwariskan tersebut. Sebagaimana Kacung Mari-

jan (1997) menyebutnya sebagai modal politik seseorang dalam politik lokal di Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan apa yang disebut King dan Wilder (Maunati, 2007:70) bahwa etnisitas merupakan ekspresi dari produk masa lalu, kebangkitan asal-usul yang sama, hubungan sosial dan kesamaan nilai-nilai budaya yang sifatnya tidak konstan, tidak kekal dan dapat dibentuk dan dikonstruksi.

### **Bahasa Daerah dan Logat Sebagai Identitas**

Ciri-ciri lain yang menjadi atribut yang dapat menegaskan Identitas seseorang dalam konteks ruang politik Kota Palu adalah bahasa daerah dan logat anggota DPRD. Penggunaan bahasa daerah dalam kegiatan komunikasi politik anggota DPRD Palu lebih banyak dilakukan oleh anggota DPRD yang menganggap diri mereka sebagai etnik asli Kaili atau etnik lain yang lahir dan besar di tanah Kaili. Hal ini juga dimungkinkan karena jumlah anggota dewan yang beretnik Kaili lebih banyak. Di lain pihak mereka yang berasal dari etnik lain atau yang dianggap sebagai pendatang akan berusaha mempelajari bahasa lokal sebagai bentuk penyesuaian diri agar dapat diterima di masyarakat lokal terutama dalam aktivitas politik. Penggunaan bahasa daerah dalam kegiatan komunikasi terutama dalam kaitan lobi dan upaya menyatukan pendapat pengambilan keputusan seringkali dianggap lebih efektif oleh para anggota DPRD yang berasal dari etnik yang sama. Penilaian itu didasarkan pada kemudahan menjalin pendekatan baik secara persuasif maupun dengan cara *coercive* kepada rekan sejawat yang memiliki etnik sama tentu dengan bungkus demi kepentingan rakyat. Hal tersebut di atas dapat tergambar dari hasil wawancara dengan WJR, seorang beretnik Jawa yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Palu dari Partai Keadilan Sejahtera berikut ini:

Misalnya ketika saya bertemu dengan konstituen dan rekan-rekan yang orang Kaili saya akan berusaha memanggil dengan "*Komiu*" atau kalau orang Bugis dengan kata-kata "*Maiki*". Tetapi dalam interaksi saya dimasyarakat yang beretnik Jawa saya tetap berusaha untuk menggunakan bahasa Jawa biar nanti mereka tidak menganggap saya sebagai

orang yang sombong dan cuek. Pada dasarnya konsep itu bukan seluruhnya faktor etnisitas tetapi Islam mengajarkan bagaimana harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dimana berada. Rasulullah sendiri ketika bertemu dengan orang atau berdakwah dengan segala umat akan berusaha menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaum yang ditemuinya. Ketika dia bertemu dengan Badui ia akan menggunakan bahasa Badui (Wawancara dengan WJR, 17 April 2010).

Selain itu, logat seseorang akan dapat menegaskan identitas seseorang. Dalam konteks DPRD Kota Palu, logat yang terdengar ketika seseorang berbicara dapat menimbulkan stereotype tertentu yang seringkali dijadikan sebagai bentuk politik pembeda. Seorang anggota dewan yang beretnis Bugis amat mudah dikenali di dalam ruang sidang DPRD ketika sedang berbicara ataupun berpidato, demikian halnya dengan anggota DPRD beretnis lain seperti Minahasa, Jawa, Sunda dan Gorontalo.

Logat telah dapat menyebabkan seseorang anggota DPRD diberikan label sebagai pendatang, oleh pengunjung sidang hanya karena berlaku kritis terhadap eksekutif. Bahkan pengalaman seorang anggota DPRD yang menjadi informan menyatakan bahwa pernah suatu ketika ia ditegur oleh Walikota Palu dengan kata-kata bernada ancaman karena sikap kritisnya. Anggota dewan tersebut disapa dengan sebutan "pendatang" dan tidak perlu mengatur Orang Palu karena yang paling tahu situasi, adalah Orang Palu sendiri. Terlepas apakah secara personal Walikota kenal yang bersangkutan, nyatanya anggota dewan tersebut memang masih sangat kental dengan logat Jawa.

Identitas etnik ditandai dengan simbol-simbol budaya, bahasa, organisasi serta ideologi mereka. Setiap etnik memiliki identitas yang harus dipatuhi oleh masyarakat itu guna berinteraksi satu sama lainnya (Eriksen: 1993). Kekhasan etnik secara kultural membuat manusia unik dalam berkomunikasi sekaligus menjadi kajian tersendiri dari para ahli antropologi maupun ahli komunikasi. Salah satu hal yang menonjol dalam interaksi sosial seseorang, terutama dalam konteks komunikasi yang melibatkan orang-orang yang berbeda etnik adalah bahasa. Bahasa se-

lain fungsinya sebagai transformator pertukaran makna pesan, fungsi pewarisan nilai-nilai sosial pun begitu menonjol.

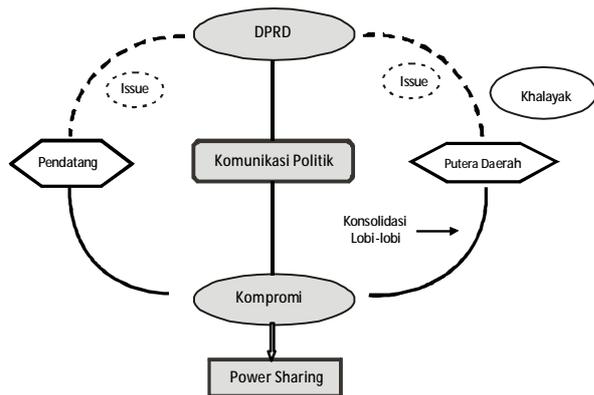
Manurut Harris dan Reilly, 2000) bahasa adalah isu pusat dalam politik etnik. Untungnya itu isu yang mudah untuk dihadapi dibanding dengan isu etnik lainnya sebab bahasa membolehkan multi-identitas. Pengetahuan bahasa bukan merupakan pemberian etnik secara eksklusif atau tetap hampir mirip dengan agama atau ras. Manusia bisa berbicara dalam beberapa bahasa dan berberapa bahasa tersebut hidup berdampingan.

### **Kategori Identitas Etnik Anggota DPRD Kota Palu Pendatang atau Orang Asli Palu?**

Dua kategori identitas tersebut adalah sesuatu yang ajeg, sehingga menjadi bentuk pembeda dalam komunikasi politik anggota dewan. Isu putra daerah berkorelasi dengan konsepsi pemberdayaan masyarakat lokal yang lalu dipertegas dan dipertajam dengan adanya fanatisme daerah sehingga simbolisasi etnik lokal semakin berkembang di berbagai bidang. Simbolisasi kultural berevolusi menjadi simbolisasi politik lokal yang telah menjadi konsumsi politik bagi kelompok-kelompok elite lokal untuk mendapatkan simpatisan dari etnik sendiri. Isu putra daerah menjadi komoditi politik lokal ini sering mencuat ketika menjelang suksesi kepemimpinan daerah dan pada saat pemilu.

Kecenderungan kalangan elit politik dan kandidat dalam menggunakan isu-isu etnis (*playing ethnic card*) karena target yang ingin didapat adalah adanya kelekatan dengan etnis yang menjadi obyeknya. Para politisi dan kandidat memainkan kartu etnis untuk mengamankan batas keunggulan yang dimilikinya dalam sebuah arena kompetisi baik ketika pemilu berlangsung maupun setelah pemilu (Posner, 2005: 57). Gambaran dikotomis etnik pendatang atau pribumi dalam politik di Kota Palu dapat disimak dari hasil wawancara dengan informan JPA (56 tahun), seorang beretnis Minahasa dari Partai Damai Sejahtera, berikut ini:

Kalau yang saya rasakan masih sangat kental. Disini identitas sebagai pendatang itu masih berpengaruh dan dilihat sebagai pembeda. Saya sudah sampai di wilayah Maluku, saya mulai dari orang Manado. Orang Manado itu



Gambar.1. Model Identifikasi Identitas dalam Komunikasi Politik di DPRD

Sumber: Diolah dari Hasil Penelitian, 2010

sangat egaliter, sehingga kadang kala saya juga biasanya jengkel biar sama-sama orang Manado, dia baku acuh. Di Manado ada istilah Motmangus atau Gotong Royong mau suka atau duka kalau ada orang menikah tetapi kalau salah mereka bilang salah. Di sini saya cemburu hati sama orang Kaili dan Toraja. Mereka saling baku dukung kuat sekali, bahkan dalam politik di DPRD ini. Mungkin juga karena saya sendiri yang Manado dan juga Kristen (wawancara tanggal 21 April 2010).

Identitas pendatang yang disematkan kepada siapa saja yang tidak memiliki hubungan kekerabatan atau genealogis dengan etnik lokal di Palu merupakan bentuk proteksi politik yang dilakukan oleh elit-elit lokal untuk menjaga dan mengembangkan kekuasaan. Tindakan akomodatif dan kompromi oleh elit-elit politik lokal (yang dianggap orang asli) nampaknya dijadikan sebagai salah satu cara untuk memperluas dan menjangkau elit-elit politik dan sosial masyarakat pendatang. Kuatnya posisi sosial dan ekonomi sebagian etnik pendatang dianggap sebagai ancaman serius bagi penduduk lokal dalam usaha melestarikan kekuasaan dan pengaruh politik. Situasi politik yang telah berubah dengan penerapan sistem politik yang demokratis di mana sistem pemilu langsung dengan suara terbanyak pada pemilu legislatif, pemilu presiden dan pemilukada juga merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh politisi lokal ketika menyadari bahwa komposisi penduduk etnik Kaili kini menjadi minoritas. Berdasarkan data hasil penelitian Suryadinata (2003) etnik Kaili di Kota Palu persentasinya hanya 38,71 persen.

Itu artinya komunikasi politik harus terjalin dengan baik kepada para elit politik yang berasal dari etnik pendatang, baik yang di luar struktur politik resmi maupun yang saat ini menjabat sebagai pejabat eksekutif maupun DPRD. Kepentingan tokoh elit lokal dalam hal ini adalah bagaimana menciptakan patron-patron politik di kalangan pendatang yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan politik yang lebih besar. Sebagai contoh, seorang ketua DPD partai yang berasal dari etnik Kaili akan menempatkan tokoh-tokoh etnik pendatang sebagai calon anggota DPRD di wilayah atau daerah pemilihan yang banyak dihuni oleh etnik yang sama dengan caleg bersangkutan. Syaratnya tentu saja adalah tokoh etnik tersebut harus loyal kepada ketua DPD partai sehingga ketika dilaksanakan kontestasi politik yang lebih besar semisal pemilu walikota-wakil walikota dan gubernur, sang caleg dapat menjadi pengumpul suara pada komunitas etniknya.

Di lain pihak, elit-elit politik etnik pendatang menjadikan kesempatan tersebut untuk meraih kekuasaan pada lembaga politik resmi. Proporsi etnik pendatang yang cukup besar akan memberi peluang yang besar untuk memasuki lembaga politik resmi seperti DPRD. Ini tentu saja dengan asumsi bahwa preferensi pemilih dalam pemilu masih diwarnai oleh isu etnisitas dan agama. Meskipun jika di lihat bahwa dengan sistem pembagian daerah pemilihan, yang seringkali memecah unit wilayah yang di dalamnya terkonsentrasi pemilih dengan etnik tertentu sehingga memperkecil peluang seorang caleg memenangkan suara terbanyak. Dengan demikian kompromi antara elit-elit politik etnik pendatang dengan elit politik pribumi, merupakan bentuk kerjasama yang saling menguntungkan. Langkah tersebut, bagi elit politik pendatang adalah yang paling tepat, karena mereka harus menyadari akan adanya tekanan yang kuat dari publik terutama etnik lokal terhadap kepemimpinan orang-orang yang berasal dari etnik pendatang. Dalam lingkungan politik di Kota Palu, dalam beberapa kasus masih menerapkan adanya *power sharing* dalam menetapkan kepemimpinan pada lembaga publik terutama lembaga politik guna menghindari terjadinya konflik. *Power sharing* dalam kadar tertentu merupakan pilihan bijaksana untuk menghindari pertikaian politik yang melibatkan

isu etnik dan agama, tetapi di sisi lain seringkali melupakan aspek kompetensi dan kapasitas seseorang.

### **Kami ini Orang Palu**

“Orang Palu” adalah sebuah konstruksi identitas yang merujuk kepada wilayah administrative yang tidak menggambarkan sebuah etnik tertentu. Orang Palu adalah sebutan yang menunjukkan bentuk penyesuaian etnik pendatang agar diterima sebagai penduduk Kota Palu yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan etnik apa saja yang berdomisili di daerah ini. Semua informan penelitian yang beretnis di luar Kaili ketika peneliti menanyakan berasal dari etnik mana? Menjawab sebagai Orang Palu. Pertanyaan yang merujuk kepada identitas etnik mereka ketika menanyakan suku apa, informan lalu menjawab dengan Bugis, Jawa, Sunda, Minahasa, Gorontalo.

Etnisitas sebagaimana pendapat (Abdillah, 2002:45) merupakan aspek penting dalam hubungan politik. Tema semacam ini muncul dari gagasan tentang perbedaan, dikotomi antara kami dan mereka serta pembedaan atas klaim terhadap dasar, asal usul dan karakteristik budaya. Eriksen (1993) menambahkan bahwa syarat kemunculan etnisitas adalah kelompok tersebut menjalin hubungan dan kontak dengan etnik lain dan masing-masing menerima gagasan dan ide-ide perbedaan di antara mereka, baik secara kultural maupun dalam politik. Dalam hal hubungan politik terutama pada aspek komunikasi politik antara etnik di Kota Palu dalam lembaga politik seperti DPRD, gagasan perbedaan dalam hal suku sebagai yang primordial, seperti identitas Jawa, Kaili, Bugis dan lain-lainnya, bisa diterima. Tetapi dalam hal identitas terkonstruksi sebagaimana sebutan dan stigma pendatang dan putera daerah, ini yang menghadapi tantangan berat. Bahwa kemudian politik identitas etnik berkembang dalam ruang ini, sebagaimana disebutkan oleh LSI memang sanyatanya ada. Ini sejalan dengan pendapat Syamsuddin Haris (LSI, 2007) bahwa kalangan partai politik dan elit politik di Indonesia masih menganggap penting politik etnisitas dalam arena mobilisasi politik, membangun jaringan, membangun koalisi-koalisi politik serta membangun jaringan lobi politik.

Usaha untuk memperoleh pengakuan sebagai bagian dari masyarakat pribumi dalam berbagai aktifitas baik sosial, ekonomi dan politik seringkali malah mempertegas batas identitas tersebut. Ketika seseorang berinteraksi dalam lingkup masyarakat yang lebih luas berbagai atribut yang melekat akan tampak lebih menonjol, hal ini karena suatu identitas yang melekat akan sulit untuk hilang dan tereduksi oleh faktor interaksi. Sebagaimana komentar informan WJR (38 thn) berikut ini:

Saya tidak bisa mengelak kalau soal etnik, disini masih ada stereotipe meskipun sudah mulai berkurang. Saya kalau ditanya selalu saya bilang saya orang Palu tetapi kelahiran Jawa karena sudah belasan tahun disini, hidup dan makan disini. Tapi pernah pada waktu periode sebelumnya, saya malah ditegur oleh Walikota dalam suatu rapat dengar pendapat dengan kata-kata “hati-hati, anda kan pendatang”. Namun setelah itu beliau meluruskan dengan mengatakan bahwa ibu Wiwik adalah orang Palu yang lahir di Jawa. Pak Wali mengutip kata-kata “Nosarara Nosa-batutu. Saya kira karena saya cukup vocal pada saat itu (wawancara tanggal 13 Mei 2010).

Hal ini telah ditegaskan Barth (1988) bahwa batas-batas budaya dapat bertahan walaupun suku-suku tersebut saling berbaur. Dengan kata lain adanya perbedaan etnik tidak ditentukan oleh terjadinya pembauran, kontak dan pertukaran informasi, namun lebih disebabkan oleh adanya proses-proses sosial berupa pemisahan dan penyatuan, sehingga perbedaan kategori tetap dipertahankan walaupun terjadi pertukaran peran serta keanggotaan di antara unit-unit etnik dalam perjalanan hidup seseorang. Bagi etnik Bugis yang bermigrasi keberbagai wilayah seringkali identik dengan profesi nelayan dan pedagang pada pasar-pasar tradisional, sementara etnik Jawa yang bermigrasi identik dengan pekerjaan petani sawah, berkebun dan jualan bakso atau mie ayam yang ulet serta tidak gengsi. Meski identitas tersebut tidaklah kaku. Demikian halnya dalam kegiatan politik terutama pada masyarakat yang multietnik, pendekatan genealogis dan kekerabatan menjadi awal berkiprahnya seseorang dalam dunia politik. Munculnya paguyuban-paguyuban yang berbau

kedaerahan di wilayah yang multietnik menambah dinamika persaingan dan konflik politik dan hal tersebut malah mempertegas perbedaan etnik.

Menjadi “orang Palu”, sebagai suatu identitas yang netral, seseorang melakukan berbagai bentuk penyesuaian diri dengan menggunakan berbagai atribut dan simbol-simbol etnik dalam interaksi dan komunikasi di masyarakat, termasuk dalam kegiatan komunikasi politik. Penggunaan bahasa daerah dalam interaksi sosial dengan penduduk lokal, mencoba melakukan penyesuaian dalam hal logat dan aksen khas lokal Palu dalam komunikasi adalah bentuk-bentuk upaya penyesuaian dalam interaksi sosial. Tidak hanya itu, penggunaan pakaian khas atau pakaian adat dalam kegiatan-kegiatan resmi maupun dalam acara keluarga juga menjadi hal yang biasa dilakukan.

### **Etnik Situasional dan Manipulasi Etnik dalam Aktifitas Komunikasi Politik**

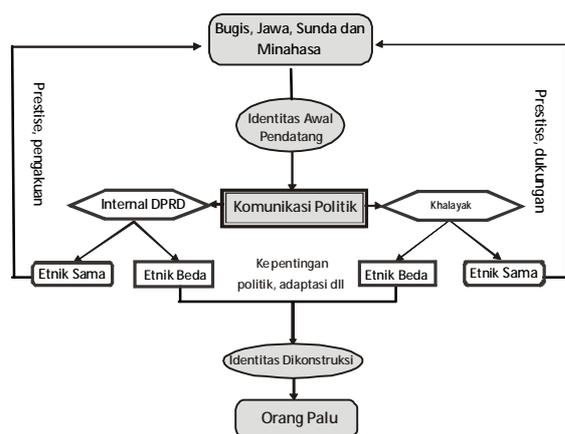
Setiap orang dalam situasi yang multi-kultural selalu diperhadapkan pada upaya adaptasi agar dapat diterima sebagai bagian dalam komunitas mayoritas dan kuat. Tindakan adaptif adalah bentuk dari upaya *survive* dan dalam menghindari terjadinya konflik yang melibatkan identitas-identitas etnik yang menjadi pembeda dalam komunitas tertentu. Dalam penelitian ini, identitas-identitas yang mengemuka sebagai bentuk politik perbedaan adalah identitas pendatang dan putera daerah, hampir seluruh konstruksi pembeda yang terjadi pada anggota DPRD berputar pada persoalan ini. Identitas sebagai orang Jawa, Sunda, Bugis, Makassar, Mandar dan Gorontalo meskipun dalam keseharian masih ditemukan prasangka dan stereotype tetapi dalam lingkup politik terutama dalam aktifitas komunikasi politik tereduksi ke dalam pembedaan berdasarkan simbol pendatang dan putera daerah.

Munculnya identitas pendatang terkait dengan konsep diri seseorang pada aspek keruangan atau pemukiman. Konsep diri pemukim telah dibentuk dalam sosialisasi awal seseorang. Berturut-turut mereka mengidentifikasi diri dalam keluarga, kampung (kota), suku dan akhirnya dalam konsep negara bangsa (*nation state*). Mereka menerima definisi-definisi yang ditawarkan

kelompok-kelompok sosial mereka tanpa mereka persoalkan dimana setiap entitas-entitas sosial itu mereka anggap bagian dari identitas kolektif. Identitas etnik muncul dengan membandingkan dialek, intonasi, isyarat nonverbal, adat istiadat, kebiasaan, nilai, makanan, pakaian, nama, raut wajah dan bahkan warna kulit milik sendiri dan milik orang lain (Mulyana, 2010:388). Orang Kaili misalnya mengkonstruksikan diri dengan tetangga dan teman sekolah mereka yang Bugis, berbeda secara etnik.

Dalam konteks penelitian ini, sebagaimana disampaikan Mulyana di atas, tampaknya berlaku pada aktivitas politik dan bagaimana mereka menampilkan diri pada ruang politik di DPRD maupun di ruang khalayak politik. Seorang politisi etnik Bugis, Jawa, Sunda berusaha untuk menjadi orang asli Palu, dengan berusaha menggunakan bahasa Kaili, mengakrabkan diri dengan makanan khas daerah, mengikuti adat-istiadat serta pakaian khas Kaili pada situasi dimana ia harus menampilkan diri sebagai politisi yang orang Palu. Aspek penerimaan etnik Kaili kepada pendatang terutama pada kegiatan politik yang jejak rekam seseorang diketahui publik tampaknya tidak cukup melalui proses simbolisasi yang bersifat arifisial. Berdasarkan apa yang teramati selama ini, penerimaan orang Kaili kepada etnik pendatang masih sangat terbatas pada hal yang bersifat geneologis, yaitu bila ada sedikit pertalian darah juga melalui perkawinan.

Alasan pengelolaan identitas etnik yang dilakukan anggota DPRD Kota Palu dapat diuraikan berdasarkan perangkat-perangkat alasan yang saling berhubungan. Meminjam temuan Armstrong pada orang Melayu di Malaysia, perangkat itu dapat dibagi menjadi tiga (Mulyana, 2006: 99). *Pertama*, berhubungan dengan pengejaran gengsi pribadi dan gengsi orang lain. Beberapa di antara identitas-identitas yang dimiliki seseorang mungkin akan lebih menghasilkan gengsi publik dibandingkan dengan yang lainnya. Dengan menggunakan identitas tertentu, seseorang dapat memiliki reputasi di depan politisi lain atau kepada khalayak (konstituen). Selain itu dapat digunakan untuk menghindari atau mengurangi konflik dan pertikaian yang mungkin timbul. Hal ini juga berkaitan dengan penggunaan gengsi tersebut kaitannya dengan harta yang berharga yang dimiliki



Gambar 2. Model Penggunaan Etnik Situasional (Bugis, Jawa, Sunda dan Minahasa) dalam Komunikasi Politik DPRD Kota Palu

Sumber: Diolah dari Hasil Penelitian, 2010

dari suatu daerah asal dan penghargaan kepada orang lain. *Kedua*, terkait dengan keberhasilan yang dicapai dalam kehidupan sehari-hari. Identitas etnik digunakan untuk memperoleh akses terhadap dukungan-dukungan sosial dengan mengasosiasikan diri pada identitas kedaerahan tertentu. Sebagai contoh, para politisi yang beretnis Jawa, Sunda, Minahasa dan Bugis akan lebih menguntungkan disebut dengan identitas “Orang Palu” dibandingkan menyebutnya sebagai Palu kelahiran Jawa atau Palu keturunan Bugis untuk menghindari klasifikasi “pendatang” atau “bukan asli Palu”. *Ketiga*, penggunaan identitas etnik politisi seiring dengan kepuasan timbal balik dengan dari ko-identifikasi. Kesamaan daerah asal memberi rasa aman melalui harapan akan nilai-nilai bersama dan saling percaya. Misalnya bagi sebagian orang Bugis, penunjukan dan penerimaan oleh orang lain yang sederhana asal akan memberi rasa aman melalui kekuatan dalam hal jumlah.

## Kesimpulan

Terdapat beragam atribut dan simbol-simbol yang menjadi pembeda untuk mengidentifikasi identitas etnis anggota DPRD. Atribut yang bersifat artifisial seperti pakaian, perhiasan, kepemilikan benda-benda elektronik dan sarana komunikasi terkini, kendaraan serta gaya hidup menandakan struktur ekonomi dan kemampuan anggota dewan. Sementara simbol-simbol yang khas menunjukkan identitas etnik seorang anggota dewan yang sering dijadikan pembeda dalam

komunikasi politik adalah bahasa daerah yang digunakan, logat atau aksen, falsafah hidup dan adat istiadat yang masih dipertahankan serta makanan khas.

Anggota DPRD Kota Palu yang berasal dari beragam etnik, mengidentifikasi identitas etnik mereka dalam komunikasi politik sesuai dengan konteks ruang dan waktu. Pada saat tertentu ketika berinteraksi dengan sesama etnik, maka identitas yang melekat seperti asal suku dan agama dengan tegas ditonjolkan. Hal ini berkaitan dengan upaya pengelolaan kesan (*impression management*) anggota DPRD dalam mencapai kepentingan mereka baik kepentingan pribadi, kelompok, partai asal dan atas nama kepentingan rakyat.

Dalam hal penggunaan identitas etnik, terdapat ciri yang menunjukkan apa yang disebut Barth sebagai etnik situasional dan manipulasi identitas etnik. Mereka yang selama ini disebut sebagai “pendatang” berusaha untuk menyesuaikan diri dengan menggunakan identitas penduduk asli seperti berusaha mempelajari bahasa daerah Kaili dan menggunakan pakaian adat lokal pada acara-acara tertentu. Sehingga penonjolan identitas sebagai “orang Palu” dilakukan dalam komunikasi politik baik kepada politisi maupun khalayak yang berasal dari etnik asli atau putera daerah. Pada sisi lain umumnya mereka masih memelihara keterikatan dengan identitas etnik dengan identitas awal, misalnya dengan ikut dalam organisasi paguyuban kedaerahan asal mereka, hal yang justru mempertegas identitas sebagai pendatang. Penggunaan beragam identitas tersebut juga dilakukan sesuai konteks dan waktu yang mereka anggap dapat memberikan keuntungan politik, penerimaan sosial dan budaya.

## Saran-saran

Politisi yang melakukan peran-peran politik dalam lembaga DPRD seharusnya dapat menghindari politisasi etnik dalam upaya meraih simpati publik maupun dalam mencapai tujuan politik baik untuk tujuan pribadi, golongan maupun untuk partai politik.

Upaya penyesuaian diri dalam suatu komunitas sosial terutama dalam peran politik hendaknya tidak menonjolkan identitas pembeda

yang sifatnya primordial karena dapat menimbulkan konflik. Dalam konteks komunikasi politik di daerah-daerah yang heterogen terutama di Indonesia Timur banyak terjadi kekerasan karena faktor politik identitas etnis.

### Ucapan Terima Kasih

Artikel ini merupakan ringkasan tesis penulis saat menyelesaikan program magister Ilmu Komunikasi di Universitas Padjadjaran Bandung, karenanya saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing penulis; Prof. H. Deddy Mulyana, MA, Ph.D dan Dra. Hj. Lukiati Komala, M.Si. Ucapan yang sama kepada para informan penelitian ini : Wiwik Jumatul Rofi'ah, Andi Patongai, Arfandi Labanu, Jaan Path Agus, Ani Suryani, Idiljan Djanggola, Muh. Ali Lamu, Danawira Asri dan Ishak Cae yang telah bersedia meluangkan waktu untuk diikuti, diamati dan diwawancarai.

### Daftar Pustaka

#### Buku Teks

- Abdillah S, Ubed, 2002, *Politik Identitas Etnis; Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*, Indonesiatera, Magelang.
- Amstrong, M. Jocelyn, 1986, *Ethnicity and Ethnic Relations in Malaysia*, Center for Southeast Asian Studies, NIU.
- Aragon, L. V., 2000, *The Colonial Introduction of Religion and Language as Ethnicity in Sulawesi, Indonesia*, University of Hawaii Press, Honolulu.
- Barth, Fredrik, 1988, *Kelompok Etnik dan Batasannya*, Terjemahan Nining I Susilo, UIP, Jakarta.
- Eriksen, Thomas Hilland, 1993, *Ethnicity and Nationalism (anthropological perspective)* Pluto Press, London.
- Horowitz, Donald L., 1981, *Ethnic Group in Conflict*, University of California Press, California.
- Horowitz, Jeremy dan James D. Long, 2006, *Democratic Survival in Multi-etnik Countries*, Working Paper, Department of Political Science, University of California, California.
- Isaacs, Harold R., 1993, *Pemujaan terhadap Kelompok Etnis (Identitas Kelompok dan Perubahan Politik)*, Terjemahan Canisyus Maran, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Liliwari, Alo, 2007, *Makna Budaya dalam Komunikasi Antarbudaya*, LKiS, Jogjakarta.
- Liliwari, Alo, 2005, *Prasangka dan Konflik*, LKiS, Jogjakarta.
- Maunati, Yekti, 2004, *Identitas Dayak (Komodifikasi dan Politik Kebudayaan)* LKiS, Yog-yakarta.
- Mulyana, Deddy, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif; Paradigma baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Metode Penelitian Komunikasi*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Komunikasi Lintas Budaya*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nimmo, Dan, 2005, *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nordholt, Henk Schulte, Klinken, Gerry Van dan Ireen Karang-Hoogenboom (editor), 2007, *Politik Lokal Indonesia*, KITLV – YOI, Jakarta.
- Nordholt, Henk Schulte (ed), 2005, *Outward Appearances: Trend, Identitas dan Kepentingan*, (diterjemahkan M. Imam Azis), LKiS - KITLV, Yogyakarta.
- Peter Harris dan Ben Reilly (ed) *Demokrasi dan Konflik yang Mengakar: Sejumlah Pilihan untuk Negosiator*, (diterjemahkan oleh LP4M), Cetakan pertama, 2000, AMEEPRO.
- Posner, Daniel N., 2005, *Institution and Ethnic Politics in Africa*, Cambridge University Press, New York.
- Suryadinata, Leo, dkk., 2003, *Penduduk Indonesia : Etnis dan Agama dalam Era Perubahan Politik*, LP3ES.
- Rirtosudiro, Riwanto, 2007, *Mencari Indonesia; Demografi-Politik Pasca-Soeharto*, LIPI – YOI, Jakarta.
- Warnaen, Suwarsih, 2002, *Stereotipe Etnis dalam Masyarakat Multietnis*, Mata Bangsa, Yogyakarta.

**Sumber-sumber Lain**  
**Jurnal**

- Abdullah, Muhammad Zein, 2008, Strategi Komunikasi Politik dan Penerapannya pada Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Indonesia Menuju Pemilu yang Berkualitas. *Jurnal Observasi* Vol. 6 No. 1 Tahun 2008, Penerbit BP2I Bandung kerjasama dengan Simbiosis Rekatama.
- Lestari, Puji dkk., 2006, Implikasi Stereotipe Antaretnik terhadap Kompetensi Komunikasi Bisnis Antarbudaya di Kalangan Pengusaha Perak Jawa dan Cina. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 4 Nomor 3, September – Desember 2006, Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UPN “Veteran” Jogjakarta.
- Maunati, Yekti, 2007, Konstruksi Identitas Masyarakat Lun Dayeh di Kalimantan Timur, *Jurnal Srinthil*, Edisi 014 tahun 2007, Penerbit Desantara-Ford Foundation.
- Rahardjo, Turnomo, 2004, Mindfulness dalam Komunikasi Antaretnis, *Jurnal Thesis* Volume III No.2 Mei-Agustus 2004, Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia.
- Rakhmat, Jalaluddin, 1999, Kritik Paradigma Pasca-Positivisme Terhadap Positivisme, *Jurnal ISKI* Vol.3/April, Remaja Rosdakarya, Bandung.

**Tesis dan Disertasi**

- Arriani, Lely, 2006, Kekerasan dalam Komunikasi Politik, *Disertasi* pada Pascasarjana Komunikasi Unpad.
- Dilla, Sumadi, 2008, Identitas Etnik Orang Muna Perantau di Kota Bandung, *Tesis Pascasarjana Ilmu Komunikasi Unpad*, Bandung.
- Susiyanto, 2006, Integrasi dan Perubahan Identitas Kelompok Etnik Jawa, Minangkabau, Melayu, Lembak, Rejang dan Serawai dalam Kerangka Etnisitas (Studi di Kota Bengkulu), *Disertasi* pada Program Pascasarjana Ilmu Sosial Unpad, Bandung.